

Jadi Gerakan Bersama Turunkan Stunting .



Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jajaran kementerian agar bekerja lebih keras dalam mempercepat upaya penurunan prevalensi anak kerdil (*stunting*).

"Sebab ini adalah merupakan prioritas pemerintah," ungkap Ma'ruf Amin. Hal itu menjadi salah satu bahasan dalam rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang digelar di kantor Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Sejauh ini, telah terjadi penurunan *stunting* dari 30,8 persen tahun pada tahun 2018 menjadi 27,67 persen pada tahun 2019. Namun angka prevalensi *stunting* tersebut masih cukup tinggi. Pasalnya, hampir satu dari tiga balita Indonesia mengalami *stunting*. Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan *stunting* sampai 14 persen pada akhir tahun 2024.

Disadari sepenuhnya bahwa tantangan terbesar dalam percepatan penurunan *stunting* adalah melakukan konvergensi, mulai tahap perencanaan sampai intervensi di tingkat desa. Sampai saat ini, terdapat anggaran Rp 29 triliun untuk pencegahan *stunting* yang tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga. Dana itu belum termasuk anggaran yang dikelola pemerintah daerah. Belum lagi anggaran yang dialokasikan dunia usaha dan masyarakat.

Wapres juga mendorong upaya pelibatan semua pihak, termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, Ma'ruf Amin mendorong agar mekanisme kerja sama pemerintah dan dunia usaha (*public private parthership*) didorong untuk pencegahan *stunting*.

Siaran Pers, yang kami terima dari Biro Humas dan Protokol Setda NTT, dalam rangkaian kunjungannya bersama tim, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) berharap agar ada kerjasama yang efektif antara pemerintah, lembaga agama, tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk menekan dan menurunkan angka *stunting*. "Angka *stunting* 48 % dan angka kemiskinan di Kabupaten TTS sebesar 27 %; harus dipasang target agar tahun 2021 yang akan datang angka *stunting* menyentuh 1 %. Ini harus jadi gerakan bersama," tandas Gubernur VBL di depan peserta Raker bersama Bupati TTS, para tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten TTS di Desa Fatukoto, Kamis (13/02/2020).

Ikut hadir bersama Gubernur VBL sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, staf ahli gubernur, Prof. Dr. Daniel D. Kameo, Dr. David B.W. Pandie, MS; dan Dr. Imanuel Blegur.

Nampak Bupati TTS, Drs. Epy Tahun, Wakil Bupati TTS, Army Konay, Ketua DPRD TTS, unsur Forkompinda Kabupaten TTS, pegiat lingkungan, Ny. Aleta Baun dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Menurut Gubernur, para tenaga medis tidak boleh kalah dengan dukun beranak dan tim doa. "Karena itu, saya minta kepada para Kepala Desa (kades) untuk melarang agar keluarga miskin jangan lagi ada anak. Asal satu keluarga miskin tidak tambah anak lagi maka angka kemiskinan kita turun ke 18%. Saya mau dimarahi oleh siapapun, saya tidak repot," tegas Gubernur.

Gubernur VBL mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten TTS, TTU dan Belu serius dalam mengurus *stunting*, pengangguran dan kemiskinan. "Kita harus bisa kendalikan pertumbuhan penduduk dari keluarga miskin; termasuk kelahiran anak dari pasangan yang tidak sah. Saya harap lembaga gereja untuk bantu urus ini. Ini masalah kemanusiaan yang harus ditangani secara serius," pinta Gubernur sembari menambahkan, "Jika angka *stunting* dan kemiskinan di Kabupaten TTS turun pasti di level provinsi juga akan turun."

Bupati Cari Sensasi,

Di tempat yang sama, Bupati TTS, Drs. Epy Tahun mengatakan, sejak dilantik menjadi Bupati TTS, pihaknya selalu menggelar rapat-rapat dan acara pelantikan pejabat di destinasi wisata. "Model seperti ini, ada banyak kalangan yang mengatakan Bupati cari sensasi. Tapi kami bilang anjing menggonggong kami jalan terus," ucap Bupati, disambut gelak tawa peserta rapat.

Menurut Bupati, menggelar acara rapat di luar atau di tempat terbuka seperti ini merupakan inovasi yang baik. "Bapak Gubernur tidak pilih tempat rapat yang eksklusif. Hal ini sangat memotivasi kami," kata Bupati.

Dijelaskan ada beberapa program yang lagi viral di Kabupaten TTS antara lain tanam air, kebun kolektif, dan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu. "Kami telah merencanakan dan kami akan eksekusi semua program itu," jelas Bupati seraya mengaku, "Kami masih kurang tenaga dokter khususnya dokter spesialis."

Seperti diketahui Fatu Nausus merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten TTS yang jaraknya 27 kilo meter arah utara dari Kota Soe. Selain itu, destinasi wisata lainnya seperti Gunung Mutis, Hutan Bonsai, Benteng Nune, Suku Boti, Sonaf Sonbesi, Taman Bu'at, Air Terjun Oehala, Pantai Kolbano, Pantai Oetune, Pantai Nualunat, Fatu Ulan, Fatukopa dan Kona Ba'u (gua kelelawar).
(sumber info : Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT/sumber lainnya: Berita Satu.com/Editor : Edy Latu-Bappelitbangda NTT).